



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)**

---

Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Direktur Utama PT PLN (Persero)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 8 September 2015
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB s.d 18.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua Rapat	:	Tamsil Linrung (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Dra. Rini Koentarti, M.Si.
Hadir Anggota	:	Orang dari 48 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	:	Direktur Utama PT PLN (Persero) beserta jajarannya.
Acara	:	1. Tarif Tenaga Listrik (TTL) 2. Produktivitas Pembangkit Listrik Eksisting 3. Program 35.000 MW Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, tanggal 8 September 2015 dibuka pukul 13.50 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara, Tarif Tenaga Listrik (TTL), Produktivitas Pembangkit Listrik Eksisting dan Program 35.000 MW.

**II. KESIMPULAN**

1. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan *roadmap* program 35.000 MW disertai rencana pembangunan infrastruktur jaringan transmisi, gardu induk, proyeksi penggunaan energinya serta portofolio antara PLN dan IPP.

2. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk mengkaji kembali sistem pembayaran listrik dengan Token agar tidak merugikan konsumen, disertai dengan data jumlah pelanggan PLN 450 watt dan 900 watt per provinsi.
3. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan secara komprehensif data yang terkait dengan realisasi pembangunan program 10.000 MW tahap I dan tahap II.
4. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menginventarisasi dan memetakan seluruh persoalan kelistrikan agar PT PLN (Persero) lebih optimal dan produktif.
5. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis secara detil dan komprehensif atas semua pertanyaan dari Anggota Komisi VII DPR RI, disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat 20 September 2015.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 18.00 WIB

Jakarta, 8 September 2015

**DIREKTUR UTAMA  
PT PLN (PERSERO)**



**Sofyan Basir**

**KETUA RAPAT,**



**TAMSIL LINRUNG**